

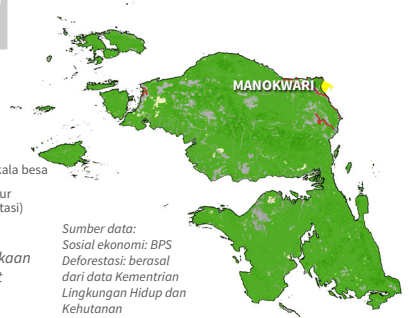


SEKILAS TENTANG PEMBANGUNAN WILAYAH PEDESAAN RENDAH EMISI (LED-R)

- 90% wilayah Papua Barat merupakan kawasan hutan dengan tingkat deforestasi historis terendah di Indonesia; Papua Barat berkomitmen untuk mempertahankan setidaknya 70% kawasan hutannya sebagai kawasan lindung melalui Deklarasi Manokwari (Manokwari Declaration/MD) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat (SDP)
- Status otonomi khusus memungkinkan pemerintah provinsi memiliki kemampuan untuk menyusun regulasi serta kewenangan untuk membuat keputusan yang lebih luas dengan mempertimbangkan konteks lokal & akses terhadap pendanaan dari pemerintah pusat hingga tahun 2021
- ~13% dari pertumbuhan PDB provinsi tahun 2003-2012 sebagian didorong oleh pertumbuhan industri gas alam [proyek gas alam cair BP Indonesia Tangguh] & sektor terkait serta belanja pemerintah setelah pembentukan provinsi
- Tingkat kemiskinan pedesaan di Papua Barat (35%; 2017) adalah dua kali lebih tinggi dari rata-rata nasional dan kesejahteraan hanya terkonsentrasi di daerah perkotaan; pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan distribusi kesejahteraan secara lebih merata
- Pada tahun 2015-2016, lahan gambut yang terdegradasi menyumbang emisi 50-55% lebih banyak daripada pembukaan hutan



■ HUTAN
■ BUKAN HUTAN
■ DEFORESTASI (1990-2015)



PENDORONG DEFORESTASI

- Penebangan liar
- Penebangan kayu (legal)
- Pertanian komersial berskala besar
- Pembangunan infrastruktur (termasuk untuk transportasi)

EMISI TAHUNAN RATA-RATA DARI DEFORESTASI

7,08 Mt CO₂ (2010-2015) mencakup biomassa permukaan tanah & penguraian gambut

LUAS KAWASAN

98.593 km²

POPULASI

937.500 (2018)

IPM

62,99 (2017)

PDB

USD 4.380.000.000 (2016, tahun dasar 2010)

GINI

0,390 (2017)

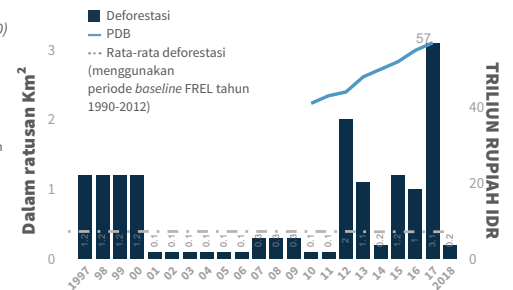
KEGIATAN EKONOMI UTAMA

- Manufaktur & industri lain
- Ekstraksi sumber daya non-terbarukan
- Pelayanan publik

PENDUDUK DESA/KOTA

68/32% (2015)

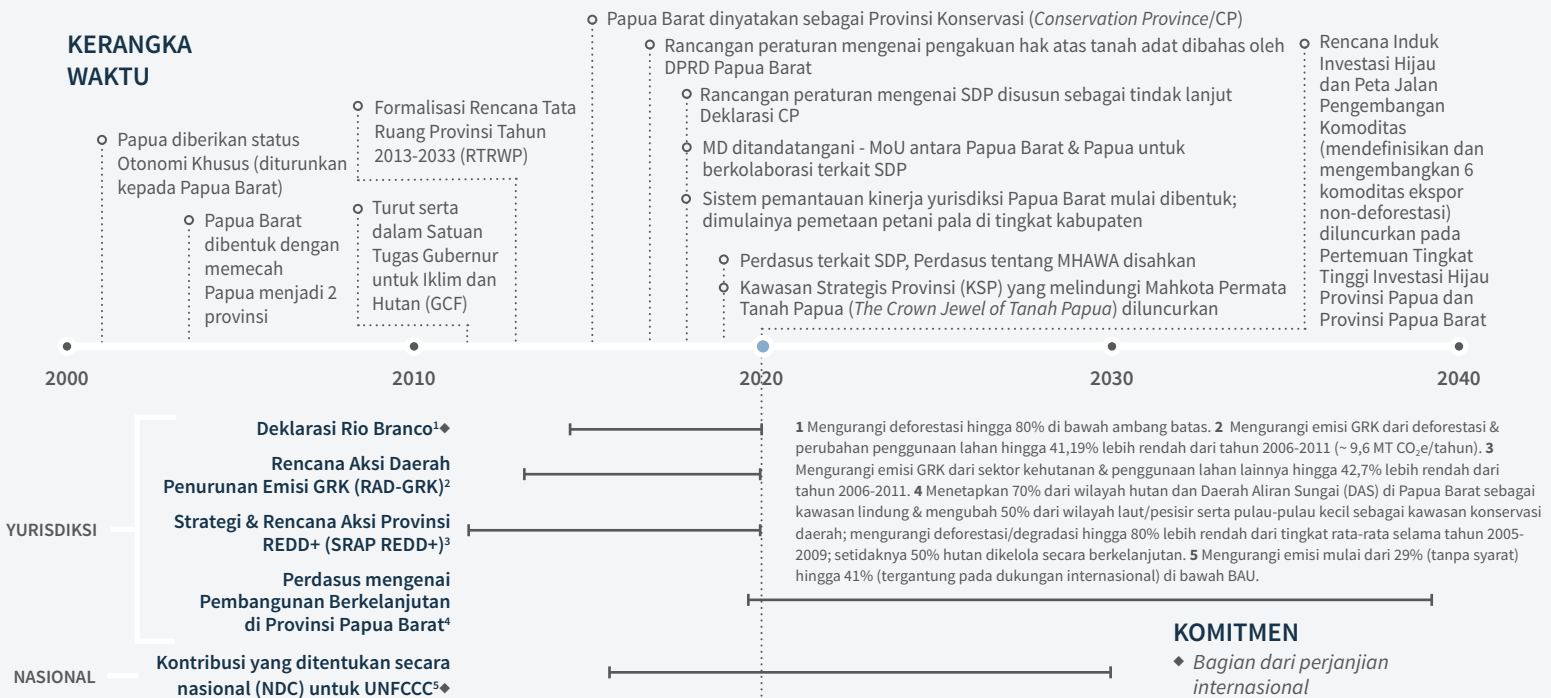
Sumber data: Sosial ekonomi: BPS Deforestasi: berasal dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



SOROTAN INOVASI

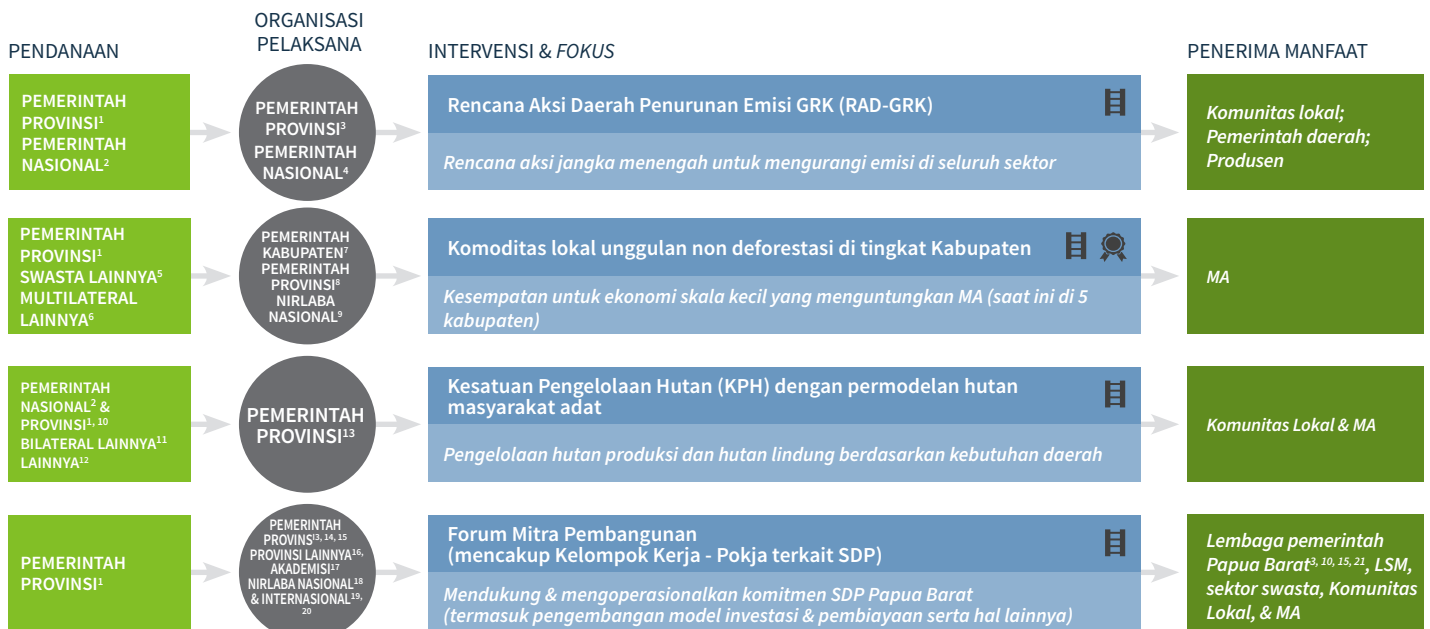
Mengikuti komitmen menjadi Provinsi Konservasi (CP) dan MD, Forum Mitra Pembangunan Papua Barat mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk menangani peningkatan ancaman dari industrialisasi dan pembangunan terhadap wilayah tutupan hutan dan keanekaragaman biokultur Papua Barat yang tinggi. Selanjutnya pada 2019, Pemerintah Provinsi Papua Barat menyatakan dirinya sebagai Provinsi dengan Pembangunan Berkelanjutan (SDP) pertama di dunia dan mengeluarkan Perdasus 10/2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan dan Perdasus 11/2019 tentang pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat (MHAWA) di Provinsi Papua Barat. SDP mengintegrasikan pelaku dari berbagai sektor ke dalam perencanaan pembangunan provinsi dan mengakui pentingnya Masyarakat Adat (MA) dalam melindungi kawasan hutan. Sebagai provinsi baru dengan perkembangan sosial-ekonomi yang relatif rendah secara nasional, SDP bertujuan untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi

dengan pemeliharaan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem, hak-hak dan mata pencaharian MA serta mengurangi risiko bagi para investor. Kebijakan ini melindungi wilayah laut/pesisir, hutan, dan DAS, menandatangani perkebunan berskala besar, menerapkan kebijakan “no palm oil” untuk izin baru, mendukung pembangunan ekonomi hijau berbasis komoditas unggulan daerah non deforestasi, serta meningkatkan akses terhadap pemanfaatan dan pembagian keuntungan dari sumber daya alam untuk MA lewat mekanisme transfer fiskal berbasis ekologis (EFT). Kemajuan dari pelaksanaan CP/SDP di Papua Barat berjalan cukup lambat, khususnya ketika pandemi Covid-19. Namun sejak penerbitan peraturan khusus tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah melakukan kampanye untuk mensosialisasikan konsep tersebut, termasuk dengan melakukan kegiatan pendidikan lingkungan dan budaya untuk memastikan pelaksanaan dan pengembangan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan berjalan efektif.



INTERVENSI UTAMA

✘ DISINSENTIF 📅 LANGKAH-LANGKAH PEMUNGKIN 🎯 INSENTIF



1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). 4 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 5 The David & Lucile Packard Foundation. 6 Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD), International Climate Initiative (IKI) of the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation & Nuclear Safety (German). 7 Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak. 8 Dinas Perkebunan Provinsi. 9 Institut Penelitian Inovasi Bumi (INOBU) & Yayasan AKAPE. 10 Dinas Kehutanan Provinsi. 11 NORAD melalui UNDP. 12 Sumber bervariasi antar KPH, tetapi umumnya termasuk pengumpulan dana dari pengelolaan pariwisata alam, pengumpulan dari perusahaan yang memanfaatkan hasil hutan non-kayu di dalam bagian terbatas dari KPH, dan/atau bantuan keuangan internasional yang diberikan kepada program kerja sama pemangku kepentingan untuk kegiatan konservasi; 13 seluruh dinas di tingkat provinsi yang dipimpin oleh Dinas Kehutanan. 14 Dewan Legislatif Papua Barat. 15 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda). 16 Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB). 17 Universitas Negeri Papua. 18 WWF Indonesia. 19 Conservation International. 20 The Nature Conservancy. 21 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan, Dinas Energi & Sumber Daya Mineral, Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Provinsi

PERKEMBANGAN KEBERLANJUTAN YURISDIKSIONAL

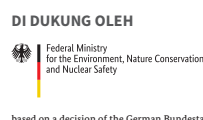
○ AWAL ● MENENGAH ● LANJUT

Strategi LED-R yang terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> ● Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022 (RPJMD) menekankan strategi CP di seluruh sektor; revisi berdasarkan peraturan tentang MD & SDP ● Peraturan mengenai SDP berfungsi sebagai strategi provinsi, dikembangkan & diatur oleh masukan dari multipihak
Rencana tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> ○ Peraturan mengenai SDP akan berfungsi sebagai dasar hukum untuk merevisi RTRWP, termasuk target konservasi baru & KSP ● RTRWP mengalokasikan wilayah untuk infrastruktur, tetapi tidak ada usulan untuk memitigasi kerusakan lingkungan
Target pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Peraturan mengenai SDP menetapkan target kuantitatif, tetapi belum ada rencana khusus untuk mencapai target ● RAD-GRK & SRAP telah secara terpisah menentukan target pengurangan emisi provinsi yang sejalan dengan target nasional (RAN-GRK)/prioritas pembangunan daerah & skenario aksi mitigasi REDD+
Monitoring, Pelaporan & Verifikasi (MRV)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sistem Pemantauan Hutan Nasional memantauutupan lahan, deforestasi & titik api setiap tahunnya; data tidak tersedia untuk publik & Pemerintah Papua Barat ● Simtaru (Sistem Informasi Perencanaan Tata Ruang) sedang dikembangkan untuk kepentingan pemantauan & perencanaan tata ruang - untuk menyertakan informasi tentang daerah tangkapan air, erosi, penggunaan lahan & perubahan kawasan hutan
Kebijakan & Insentif	<ul style="list-style-type: none"> ○ Peraturan Daerah Papua Barat tentang SDP & hak tanah adat, serta fokus nasional terkait pembangunan infrastruktur & pertanian, mewakili kepentingan yang bersaing dalam & antara Pemerintah Provinsi dan Nasional ● Insentif EFT diusulkan untuk memajukan pembangunan berkelanjutan & pelestarian hutan
Tata kelola para pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> ● Kelompok Kerja terkait Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) pada kawasan hutan milik negara dan adat menjamin hak-hak pengelolaan oleh komunitas lokal dan menciptakan insentif untuk mengelola hutan (terutama hasil hutan non-kayu) ● Pokja SDP secara informal dibentuk di bawah Balitbangda, melibatkan MA, komunitas lokal, Pemerintah Papua Barat, LSM, universitas
Pertanian berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Inisiatif Pemerintah Nasional & Pemerintah Provinsi Papua Barat terkait pengembangan industri secara berkelanjutan (misalnya, cokelat dan kopi) & target MA untuk meningkatkan pendapatan melalui komoditas lokal (misalnya, sagu, pala), namun partisipasi MA masih rendah ● Pemerintah memberikan bantuan teknis & penyuluhan secara berkala, tetapi terbentur pendanaan, kapasitas staf, & infrastruktur yang terbatas; Dana Farmfit dari IDH pun menyediakan dana serta layanan teknis bagi petani untuk meningkatkan produktivitas mereka secara berkelanjutan
Masyarakat adat & Komunitas lokal	<ul style="list-style-type: none"> ● Peraturan mengenai SDP diperluas hingga mencakup hak-hak MA dan memungkinkan MA untuk mengusulkan alokasi daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan mata pencaharian dan konservasi/perlindungan melalui MRPB (yang disusun berdasarkan UU Otonomi Khusus) ● Pengakuan terhadap MHAWA dikembangkan dengan dukungan dari MRPB, LSM, & badan keuangan internasional untuk menyediakan protokol yang rinci terkait klaim atas lahan MA dan tanah adat
Pembiayaan LED-R	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sebagian besar dari dana yang mendukung LED-R berasal dari Pemerintah Nasional; Pemerintah Papua Barat mencari dukungan tambahan melalui MD ● Pendanaan Otonomi Khusus dengan jumlah yang cukup besar yang berasal dari Pemerintah Nasional; terutama untuk pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur, dapat memperkuat perekonomian lokal dan meningkatkan standar hidup di Papua Barat, termasuk untuk MA

KUTIPAN | I. Pulungan, C. Stickler, O. David, S. Peteru, N. Hapsari. 2020. "Papua Barat, Indonesia" dalam C. Stickler *et al.* (Eds.), *Keadaan Keberlanjutan Yurisdiksional*. San Francisco, CA: EII; Bogor, Indonesia: CIFOR; Boulder, CO: GCF-TF.

REFERENSI DAN SUMBER DATA YANG LEBIH LENGKAP DAPAT DILIHAT DI www.earthinnovation.org/state-of-jurisdictional-sustainability-2020/12/30

TIM TEKNIS



based on a decision of the German Bundestag

TANTANGAN & PELUANG

TANTANGAN

- Ketergantungan pada kegiatan ekstraktif membatasi kapasitas untuk mengembangkan sektor lain (misalnya, pertanian), menghambat pertumbuhan ekonomi pedesaan & penurunan tingkat kemiskinan
- Ketegangan seputar konflik lahan di masa lalu mempersulit pemetaan lahan tradisional → data spasial pemanfaatan lahan dikumpulkan melalui cara-cara partisipatif, tetapi tidak selalu mempengaruhi pembuatan keputusan
- Jalan TransPapua, yang direncanakan oleh pemerintah pusat, sedang dibangun. Bertujuan untuk meningkatkan konektivitas Provinsi WP & Papua. Namun, kegiatan ini mungkin memiliki berdampak pada hutan, satwa liar, & konservasi
- Konflik kepentingan antara pemerintah nasional & pemerintah WP menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan SDP, konservasi & komunitas lokal

PELUANG

- Peraturan SDP dapat berfungsi sebagai model untuk provinsi lain & meningkatkan peluang pembiayaan/investasi
- Hak MA atas tanah dalam peraturan SDP dan MHAWA dapat meningkatkan mata pencaharian, meratakan distribusi manfaat, memperkuat kelembagaan, serta mendorong partisipasi lokal dalam perencanaan pembangunan nasional
- Pengembangan industri perikanan & kelautan dapat mengurangi tekanan terhadap hutan, mendukung ekowisata, serta memperluas ekspor produk perikanan
- Analisis KLHK tahun 2019 terkait Pulau Papua meliputi rencana aksi & strategi serta target, memungkinkan penyesuaian kepentingan Pemerintah Nasional dan Papua Barat terkait konservasi & keanekaragaman hayati